

## **BAB IV**

### **PENGARUH KERJA SAMA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN MOROWALI**

#### **A. Pengaruh Kerja Sama Terhadap Pendapatan Daerah**

Sejak sektor pertambangan mineral dan batubara dibuka dan menjadi kewenangan pemerintah daerah (kabupaten dan kota) dalam hal pemberian izin usaha pertambangan (IUP), pertumbuhan ekonomi makro kabupaten Morowali dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 tumbuh rata-rata 7,6 % setiap tahunnya. Sektor yang paling menonjol dalam hal ini adalah sektor pertambangan.

Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk pemberian kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain yang sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari dua jenis yakni dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (tax sharing) dan bagi hasil penerimaan sumber daya alam. Dana transfer merupakan komponen yang terdiri dari dana alokasi khusus (DAU) dan dana alokasi umum (DAU).
  3. Pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan misalnya hibah dan lain sebagainya.

Dalam konteks kerja sama antara pemerintah kabupaten Morowali dengan PT Sulawesi Mining Investment, selaku investor PT Sulawesi Mining Investment memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditaati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi pembayaran royalti serta landrent dan pajak. Kewajiban melakukan pembayaran atas royalti dan landrent ini dikarenakan pemilik sebenarnya yakni kabupaten Morowali telah memberikan izin kepada penerima izin yakni PT Sulawesi Mining Investment untuk mengambil manfaat dari adanya kekayaan mineral (nikel) di wilayah kabupaten Morowali. Royalti serta landrent yang dibayarkan oleh PT Sulawesi Mining Investment ini masuk ke dalam pendapatan daerah berupa dana bagi hasil (DBH), dana bagi hasil ini kemudian dibagi menjadi dua yaitu diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten Morowali. Pembayaran yang dilakukan ke pemerintah daerah kabupaten Morowali ini diatur dalam pengaturan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) pertambangan umum yang tertuang dalam "*Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Nomor 2498/84MEM/2008 Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak bumi, dan Gas Bumi untuk Tahun 2009*". Keputusan menteri ESDM ini tidak mengatur mengenai

teknis pengelolaan PNPB pertambangan umum, akan tetapi hanya mengatur mengenai dasar perhitungan bagian daerah penghasil sumber daya alam sektor pertambangan umum, yaitu mengenai perkiraan penerimaan daerah penghasil pertambangan umum dari iuran tetap/landrent dan perkiraan penerimaan dari iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/royalti. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan bagian daerah penghasil PNPB di sektor pertambangan umum adalah sebagai berikut :

1. Daerah penghasil iuran tetap (landrent) adalah provinsi/kabupaten/kota di mana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan Negara.
2. Daerah penghasil royalti adalah provinsi/kabupaten/kota di mana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

PT Sulawesi Mining Investment selaku investor yang menanamkan modalnya dalam pembangunan kawasan industri pengolahan dan pemurnian serta melakukan kegiatan eksplorasi, juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak terhadap pemerintah daerah kabupaten Morowali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Undang-Undang ini merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengeluarkan peraturan daerah untuk memungut pajak dan retribusi di daerahnya masing-masing, terkhususnya di kabupaten Morowali. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kabupaten Morowali terhadap PT Sulawesi Mining Investment adalah

pajak bangunan dan pajak bumi atas kawasan industri pengolahan dan pemurniaan serta infrastruktur penunjang lainnya.

Untuk melihat seberapa besar kontribusi PT Sulawesi Mining Invesment dalam meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Morowali, dapat dilihat dari postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Morowali dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut.

### **1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013**

Total pendapatan daerah kabupaten Morowali pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 876.902.720.703 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 36.673.796.750.
- b. Dana Perimbangan Rp 785.368.867.575.
- c. Pendapatan lain-lain yang sah Rp 54.860.056.425.

Adapun kontribusi PT Sulawesi Mining Invesment terhadap pendapatan daerah dapat dilihat melalui PAD dalam komponen pajak bumi dan bangunan serta melalui DBH dalam komponen royalti sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah sebesar Rp 8.725.625.900, yang terdiri dari pajak bumi Rp 5.275.350.450 dan pajak bangunan Rp 3.450.275.500.
- b. Dana bagi hasil yang tergabung dalam komponen dana perimbangan meliputi dana alokasi umum Rp 500.750.560.000, dana alokasi khusus Rp 135.560.950.000, dan dana bagi hasil Rp 149.057.357.575.<sup>1</sup>

Dari total pendapatan asli daerah kabupaten Morowali sebesar Rp 36.673.796.750, kontribusi PT Sulawesi Mining Invesment adalah sebesar Rp

---

<sup>1</sup> Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) kabupaten Morowali.

8.725.625.900 atau sebesar 23,8 %. Sedangkan dari total dana bagi hasil royalti serta landrent sebesar Rp 149.057.357.575, kontribusi yang diberikan sebesar Rp 74.841.699.238 atau sebesar 50,21%.

## **2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014**

Total pendapatan daerah kabupaten Morowali pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 520.533.195.831 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah Rp 39.528.894.781.
- b. Dana perimbangan Rp 432.472.418.023.
- c. Pendapatan lain-lain yang sah Rp 48.531.883.027.

Pada tahun anggaran 2014 total pendapatan daerah kabupaten Morowali turun sebesar 40%, hal ini terjadi karena dari total pendapatan daerah yang ada, sebesar 40% harus diserahkan kepada kabupaten Morowali Utara yang baru dibentuk sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Morowali yang merupakan kewajiban kabupaten induk. Namun, dari sisi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pertambangan, khususnya kontribusi PT Sulawesi Mining Investment masih relatif sama dengan tahun anggaran 2013.<sup>2</sup>

## **3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015**

Total pendapatan daerah kabupaten Morowali pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 947.046.939.703 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah Rp 81.010.135.335
- b. Dana Perimbangan Rp 665.176.964.000
- c. Pendapatan lain-lain yang sah Rp 34.923.313.631

Dari total pendapatan daerah kabupaten Morowali pada tahun 2015, kontribusi dari PT Sulawesi Mining Investment adalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) kabupaten Morowali.

- a. Pendapatan asli daerah Rp 28.375.450.500, yang terdiri dari Pajak bangunan Rp 19.526.485.650 dan pajak bumi Rp 8.848.964.850.
- b. Dana bagi hasil tergabung dalam komponen pendapatan dana perimbangan yang meliputi dana alokasi khusus Rp 136.649.738.750, dana alokasi umum Rp 350.276.850.00 dan dana bagi hasil sebesar Rp 178.250.374.250.

Dari komponen penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi daerah, kontribusi perusahaan ini adalah sebesar Rp 28.375.450.500 atau sebesar 35,02%. Sedangkan dari komponen dana bagi hasil sebesar Rp 178.250.375.250 kontribusi PT Sulawesi Mining Invesment yang bersumber dari royalti pertambangan adalah sebesar Rp 102.761.341.332 atau 57,65 %.<sup>3</sup>

#### **4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016**

Total pendapatan daerah kabupaten Morowali pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.172.934.497.650, yang terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah Rp 131.265.071.449.
- b. Dana Perimbangan Rp 871.040.783.553.
- c. Pendapatan lain-lain yang sah Rp 170.668.642.648.

Dari total pendapatn daerah kabupaten Morowali pada tahun 2016, kontribusi yang diberikan oleh PT Sulawesi Mining Invesment adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan asli daerah Rp 51.259.335.575, yang terdiri dari pajak bangunan Rp 30.499.304.667 dan pajak bumi Rp 20.760.030.908.
- b. Dana bagi hasil yang tergabung dalam komponen dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum Rp 430.275.550.00, dana alokasi khusus Rp

---

<sup>3</sup> Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali

175.450.725.500, dan dana bagi hasil Rp 265.314.508.053.

Seperti yang diuraikan di atas, dari total pendapatan asli daerah Rp 131.265.071.449, kontribusi yang diberikan oleh PT Sulawesi Mining Investment berupa pajak dan retribusi daerah adalah sebesar Rp 51.259.335.575 atau sebesar 39,05%. Dari komponen dana bagi hasil berupa dengan total Rp 265.314.508.053, perusahaan ini memberikan kontribusi sebesar Rp 174.450.570.450 atau 65,75%.<sup>4</sup>

Dalam pendapatan daerah kabupaten Morowali pada tahun 2016 terlihat bahwa kontribusi perusahaan ini terhadap pendapatan daerah cukup besar, baik melalui pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi daerah maupun melalui dana bagi hasil berupa royalti tambang. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan tabel kenaikan pendapatan daerah kabupaten Morowali yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dana bagi hasil yang merupakan kontribusi dari PT Sulawesi Mining Investment.

---

<sup>4</sup> Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Morowali.

**Tabel 4.1 Kenaikan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013, 2015, dan 2016**

<b>Tahun</b>	<b>Sumber Pendapatan</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>
2013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 8.725.625.900
2015		Rp 28.375.450.500
2016		Rp 51.259.335.575
2013	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 74.841.699.238
2015		Rp 102.761.341.332
2016		Rp 174.450.570.450

Sumber data : Dinas PPKAD (2017)

Pembangunan smelter, kawasan hilirisasi industri berbahan dasar mineral, dan eksplorasi nikel di kabupaten Morowali oleh PT Sulawesi Mining Investment yang merupakan konsekuensi positif dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara telah memberi pengaruh terhadap pendapatan daerah di kabupaten Morowali. Hal ini terlihat dari angka-angka penerimaan pendapatan daerah kabupaten Morowali sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu tahun 2013 sampai dengan 2016 kecuali tahun 2014. Tampak bahwa kontribusi PT Sulawesi Mining Investment terhadap penerimaan pendapatan daerah kabupaten Morowali dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, baik penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) yang berupa pajak bumi dan bangunan, serta penerimaan yang bersumber dari



dana bagi hasil (DBH) antara pusat dan daerah yang berupa royalti tambang dan landrent.

Dari angka-angka tersebut di atas, terlihat jelas bahwa kenaikan yang cukup besar terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016 setelah perusahaan membangun dan mengoperasikan satu unit pabrik pengolahan biji nikel dan satu unit pembangkit listrik tenaga uap dari rencana pembangunan dua unit pabrik yang saat ini telah memasuki masa prakonstruksi. Selain itu dalam rencana jangka panjangnya akan dibangun industri-industri lain yang berbahan baku nikel sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sektor pertambangan yang merupakan sektor yang memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah kabupaten Morowali diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap pendapatan daerah. Mengingat adanya kebijakan pemerintah pusat berupa pemberian keringanan pajak melalui tax holiday agar proses investasi pembangunan industri hilir segera terselesaikan. Maka, ketika tax holiday yang diberikan ke PT Sulawesi Mining Investment berakhir, diharapkan kontribusinya akan lebih besar.

Selain dari pendapatan daerah, yang menonjol dari kerja sama pembangunan kawasan industri dan eksplorasi nikel ini adalah tumbuhnya pusat-pusat ekonomi di sekitar kawasan pengolahan dan pemurnian nikel berupa pemukiman baru yang menyediakan segala keperluan berupa pertokoan, rumah makan, pasar-pasar tradisional, penginapan dan lain sebagainya. Pasar yang dahulunya hanya ada seminggu sekali, sekarang di kecamatan bahodopi tempat kawasan ini berada telah berdiri pasar permanen yang dibuka setiap hari untuk perdagangan umum. Keberadaan kawasan ini di tengah-tengah masyarakat terlihat sekali pengaruhnya, masyarakat

yang dulunya hanya mengandalkan mata pencaharian sebagai petani dan nelayan tradisional, saat ini bergerak maju dengan berbagai macam mata pencaharian, ada yang menjadi pedagang, pekerja pabrik nikel, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja mendorong perekonomian daerah dari sektor-sektor usaha kecil dan akan memberi kontribusi yang baik.

Pembangunan ekonomi suatu daerah selalu diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan lain-lain.

#### B. Pengaruh Kerja Sama Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam suatu proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja memiliki peranan penting karena manusialah yang menggerakkan semua sumber-sumber produksi seperti sumber daya alam dan lain sebagainya untuk mengolah sehingga menghasilkan barang jadi. Banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor tersebut.

Permintaan akan tenaga kerja secara tidak langsung dipengaruhi oleh PDRB, sedangkan PDRB dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, investasi, pendapatan pemerintah, ekspor, dan impor. Kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan, maka peningkatan ini akan selalu diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan kerja, karena pertambahan barang modal sebagai akibat dari investasi akan menambah kapasitas produksi.

Sejak pembangunan dan pengoperasian pabrik pengolahan PT Sulawesi Mining Investment di kabupaten Morowali, pabrik tersebut telah menyerap banyak tenaga kerja yang berasal dari kabupaten Morowali. Sesuai data-data yang dihimpun dari Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi kabupaten Morowali yang diambil dari tahun 2013 sebelum pabrik beroperasi sampai dengan tahun 2016 setelah pabrik pengolahan dan pemurnian nikel dioperasionalkan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Jumlah Tenaga Kerja Lokal dan Asing Pada PT Sulawesi Mining Invesment Tahun 2013 – 2016**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja Lokal</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja Asing</b>	<b>Keterangan</b>
2013	2.288	135	Prakonstruksi
2014	3.743	284	Konstruksi
2015	7.969	698	Operasional Pabrik dan Sarana Penunjang
2016	8.214	973	Operasional Pabrik

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali (2017)

Dari tabel di atas terlihat bahwa PT Sulawesi Mining Invesment sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral nikel yang membangun kawasan pengolahan dan pemurnian nikel di kabupaten Morowali telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyediaan dan penyerapan tenaga kerja di kabupaten Morowali. Dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT Sulawesi Mining Invesment, terlihat bahwa pada tahun 2013 saat pra konstruksi yakni tahap persiapan pembangunan industri pabrik pengolahan dan fasilitas

penunjang lainnya berupa pembangkit listrik dan pelabuhan, jumlah tenaga kerja lokal yang terserap adalah 2.288 orang.

Pada tahun 2014 saat konstruksi dimulai, jumlah tenaga kerja yang terserap adalah 3.741 orang. Tenaga kerja yang bekerja di PT Sulawesi Mining Investment pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena pabrik pengolahan dan pemurnian nikel serta sarana penunjang lainnya telah beroperasi sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja. Dari angka-angka yang terlihat di tabel, terlihat jelas bahwa tenaga kerja yang terserap dalam kawasan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diproyeksikan pada tahun 2017-2020 kawasan pengolahan dan pemurnian nikel milik PT Sulawesi Mining Investment ini akan menyerap 11.257 tenaga kerja di level pelaksana dan 1577 orang di level supervisor.

Dengan meluasnya kesempatan kerja yang ada di kawasan industri pengolahan dan pemurnian nikel milik PT Sulawesi Mining Investment, berarti semakin banyak tenaga kerja yang dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan. Hal ini akan berpengaruh pula pada semakin banyaknya masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan hidup. Dengan memperoleh pekerjaan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pendapatan yang diterima dari pekerjaan tersebut. Ini berarti melibatakan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi dan mempertinggi pertumbuhan ekonomi. Karena apabila pendapatan bertambah, maka orang akan cenderung membelanjakan kebutuhannya lebih meningkat dari pendapatan sebelumnya, sehingga memperluas pasar barang dan jasa, serta mendorong perputaran perekonomian daerah.

Melihat gambaran data-data yang telah dipaparkan dari aspek pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja, kerja sama pembangunan kawasan industri pengolahan dan pemurnian nikel oleh pemerintah daerah kabupaten

Morowali dan PT Sulawesi Mining Investment tersebut sangat berpengaruh baik dilihat dari kepentingan jangka pendek, menengah, maupun kepentingan jangka panjang.

Penetapan otonomi daerah dewasa ini memberikan prospek yang menguntungkan bagi aktivitas investasi di daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan sektor swasta di mana hal ini memainkan peranan penting dalam mendorong perekonomian daerah yang berarti akan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah dan mendorong peningkatan pendapatan dari sisi penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi serta adanya perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut. Ukuran perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari output yang dihasilkan dan pemanfaatan sumber daya di daerah yang dilakukan secara optimal, sehingga memotivasi proses pertukaran produksi lintas wilayah maupun lintas sektor. Oleh karena itu investasi asing yang bersumber dari kerja sama menjadi isu penting bagi daerah, khususnya di kabupaten Morowali.